BENNY MINTA KEPALA OPD

Cepat dalam Komunikasi dan Penyajian Data

KR - Sri Warsiti

Wabup H Benny bersama Ahmad Luthfi dan tim.

KLATEN (KR) - Wakil Bupati Klaten sekaligus Plh Bupati Klaten H Benny Indra Ardhianto menekankan agar jajaran OPD bergerak cepat, baik dalam komunikasi maupun penyiapan data yang diperlukan oleh BPK. Hal ini dikemukakan Benny usai acara entry meeting BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, di Pemkab Klaten, Senin (24/2).

Benny menjelaskan, entry meeting juga sebagai penentu utama agar Pemkab Klaten bisa mempertahankan WTP. Persiapan proses audit utamanya adalah data dari masing-masing OPD yang diperlukan untuk pemeriksaan tim BPK.

"Saya menekankan untuk komunikasinya dan juga kecepatan waktunya dari rekan-rekan OPD. Apa yang diperlukan dari teman-teman BPK nanti untuk pemeriksaan seperti apa, karena memang ini agak mendesak, nanti menghadapi Lebaran cuti kan liburnya juga lumayan panjang. Jadi nanti kita upayakan secepat mungkin sesuai timeline yang sudah kita plan kan. Semoga nanti Klaten dapat WTP lagi," jelas Benny.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan, entry meeting sebagai komunikasi audit yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. ìKami akan melakukan pemeriksaan LKPD, jadi kami menyampaikan hal-hal apa tujuan dari pemeriksaan.

Menurut Ahmad Luthfi, pemeriksaan LKPD dilakukan dua tahap. Pemeriksaan interim selama 25 hari ke depan, kemudian setelah Lebaran dilakukan pemeriksaan terinci.

"Sekarang ini pertama melihat sejauh mana Pemkab Klaten telah menindaklanjuti semua rekomendasi dari temuan-temuan yang lalu. Kemudian kami juga mempelajari lagi efektivitas dari sistem pengendalian internal yang ada. Kami juga mempelajari atau melakukan pengujian terbatas sementara pada tingkat kepatuhan. Antara lain seperti itu," kata Ahmad Luthfi.

Terkait adanya masa transisi pergantian kepemimpinan, Ahmad Luthfi mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya dengan program pemeriksaan yang dilakukan BPK. "Ini pemeriksaan rutin setiap tahun, mandatory audit bagi kami, jadi ada pergantian pemerintahan pun tidak menjadi masalah," jelas Ahmad Luthfi.

Hal-hal yang harus diperhatikan, lanjut Ahmad Luthfi, adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, efektivitas pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan. **(Sit)-d**

HARI KEEMPAT PELAKSANAAN RETRET

Pramono Anung Tiba di Lembah Tidar

MAGELANG (KR) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tiba di area retret kepala daerah yang ada di kawasan Lembah Gunung Tidar Magelang Borobudur International Golf & Country Club Magelang kompleks Akademi Militer (Akmil), Senin (24/2). Ia datang sekitar pukul 13.15 WIB didampingi Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan lainnya, disambut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya S.

Kepada wartawan yang menemuinya, Pramono Anung mengatakan dirinya bersama Walikota Yogyakarta dan 17 kepala daerah lainnya yang bersama-sama dengannya, untuk mengikuti retret. "Kenapa hari ini, tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa," katanya sambil mengatakan apapun dirinya tetap melakukan komunikasi dengan Megawati Soekarnoputri dan DPP PDIP mengenai apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penundaan.

Dalam kesempatan ini Pramono Anung juga mengucapkan terima kasihnya atas kesabaran semuanya, terutama kepada Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri dan semuanya. "Yang setelah 4 hari lebih ini kami baru mengikuti retret ini," katanya. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sudah menitipkan tugasnya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel untuk tetap gas pol memberdayakan Pasukan Biru, Pasukan Oranye, Pasukan Hijau, dan Pasukan Kuning. "Mereka harus senantiasa siap karena bagaimanapun itulah yang diharapkan masyarakat.," tambahnya.

Ditanya mengenai surat dari Ketua DPP PDIP mengenai penundaan mengikuti retret di Magelang, Pramono Anung mengatakan surat itu kewenangan sepenuhnya Megawati Soekarnoputri dan partai. Meskipun demikan, pihaknya melakukan komunikasi dengan seluruh DPP.

Sementara itu dalam rangkaian hari keempat kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah, kemarin diwarnai dengan senam pagi, apel pagi, diskusi provinsi serta beberapa paparan, di antaranya paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas, paparan Menteri PAN-RB, paparan Menko Bidang Politik dan Keamanan, paparan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, paparan Panglima TNI, Kepala BIN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Rini Widyantini mengatakan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini mengingat birokrasi merupakan mesin yang dapat mendukung pembangunan.

Karena itu, dirinya mengajak kepala daerah agar memperhatikan berbagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut proses administrasi. Hal ini merupakan langkah reformasi pemerintahan yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajemen kinerja, bisnis proses, dan pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, perencanaan pembangunan nasional memerlukan orkestrasi mulai perencanaan hingga implementasi. **(Tha)-d**

KR- M.Thoha

Pramono Anung saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin.

SEMBILAN WILAYAH JATENG

Berstatus Siaga Curah Hujan Tinggi

CILACAP (KR) - Sebanyak sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah berstatus siaga curah hujan tinggi dan 20 wilayah lainnya berstatus waspada pada tanggal 24-28 Februari 2025. Kesembilan wilayah tersebut meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap.

Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Senin, (24/2) mengatakan sembilan kabupaten/kota yang berstatus siaga curah hujan tinggi atau berkisar 200-300 milimeter per dasarian.

Sementara 20 kabupaten/kota yang berstatus waspada curah hujan tinggi atau 150-200 milimeter per dasarian meliputi Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.

"Hal itu diketahui berdasarkan Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian III Februari 2025 yang dikeluarkan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan berdasarkan tinjauan paramater iklim secara umum, baik global maupun regional, terhadap hasil pemantauan Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino-Southern Oscillation (ENSO) pada dasarian pertama bulan Februari 2025 menunjukkan indeks IOD berada pada kategori netral dengan indeks IOD minus 0,27 dan diprediksi berlanjut hingga pertengahan tahun 2025.

Sementara anomali suhu permukaan laut (sea surface temperature/SST) di Nino3.4 berada pada indeks minus 1,18 (kategori La Nina Lemah) sedangkan pada periode Maret hingga Mei 2025 diprediksi Netral. Menurut dia, anomali SST Perairan Indonesia periode pada Maret hingga Juli 2025 umumnya diprediksi akan didominasi oleh anomali positif atau lebih hangat dengan kisaran nilai 0 derajat Celsius hingga 1 derajat Celsius. "Saat ini, seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada periode musim hujan. Puncak musim hujan 2024/2025 di Jawa Tengah umumnya terjadi pada bulan Januari dan Februari 2025," katanya.

Di sisi lain, kata dia, bibit siklon tropis 99S yang beberapa hari lalu terpantau berada di Samudera Hindia selatan Jawa Timur, saat sekarang berada di Samudra Hindia selatan Jateng. Menurut dia, hal itu berpotensi memicu terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang kadang disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jateng termasuk kabupaten/kota yang berstatus siaga dan waspada curah hujan tinggi tersebut. **(Ant/Ogi)-d**

DLH RANGKUL LDII WONOGIRI

Inisiasi Pengelolaan Sampah Mandiri

KR-Djoko Santosa

Pembukaan workshop pengelolaan sampah LDII Wonogiri.

WONOGIRI (KR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wonogiri hanya mampu menangani 17,43 persen dari total 127.166,54 ton pertahun sampah di kabupaten ini. Problem Pemkab Wonogiri semakin berat karena TPA yang ada di Kecamatan Ngadirojo tahun 2027 mendatang sudah penuh sehingga tidak bisa dipakai lagi.

Hal ini diungkapkan Kepala DLH Wonogiri Drs Bahari MSi saat membuka workshop pengelolaan sampah yang digelar DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Wonogiri di SMP Bina Insani Wonogiri, Senin (24/02/2025). Workshop bertajuk "Merawat Bumi dengan Bangkit Mandiri Mengelola Sampah untuk Ponpes yang Bersih dan Sehat" diikuti 90 peserta dari sejumlah ponpes di bawah binaan LDII.

Ketua DPD LDII Wonogiri, Sutoyo, menegaskan bahwa pihaknya sangat konsisten dalam menangani permasalahan sampah, khususnya di lingkungan sekolah dan pondok pesantren. "Kami ingin menanamkan sikap cinta kebersihan dan kesehatan sejak dini. Kebersihan adalah bagian dari iman, dan ini harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Dalam workshop ini, LDII menekankan pentingnya edukasi dalam pengelolaan sampah. Para peserta diajarkan metode pemilahan, pengurangan, dan daur ulang sampah, sehingga tidak semua sampah berakhir di TPA.Kepala DLH Wonogiri mengapresiasi inisiatif LDII dalam menangani permasalahan sampah. Ia mengungkapkan bahwa produksi sampah di Wonogiri sangat tinggi, dengan sekitar 50 ton perhari yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngadirojo dari tujuh kecamatan.

"Sampah bukan sesuatu yang menarik, tidak ganteng, cantik, seksi, tetapi ketika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak yang luas. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan, itu mungkin menyelesaikan masalah pribadinya, tetapi menciptakan masalah baru bagi lingkungan," kata Bahari.

Permasalahan sampah di Wonogiri meliputi adanya 50 ton produksi sampah perhari yang masuk ke TPA Ngadirojo, dari sekitar 7 kecamatan. Sementara timbulan sampah pertahun di Wonogiri secara total tembus 127.166,54 ton, dari jumlah itu baru 17,43 persen sampah yang tertangani, 56,64 persen sampah terkelola, dan pengurangan sampah sebesar 39,31 persen.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan lahan TPA Ngadirojo. Dari total luas 82 hektare di TPA Ngadirojo, kini hanya tersisa 7.500 meter persegi di zona C yang masih aktif. Zona A dan B sudah tidak bisa digunakan lagi, dan diperkirakan zona C akan penuh pada tahun 2027. **(Dsh)-d**

DPRD JATENG MINTA SEKOLAH

Pastikan Nilai Budaya Masuk Materi Pendidikan

SEMARANG (KR) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pendidikan di sekolah harus memastikan nilai budaya menjadi dasar dalam mencetak generasi berkualitas dan berkarakter. Menurutnya, pendidikan tidak hanya sekadar memberikan ilmu pengetahuan, namun juga membentuk kepribadian dan nilai-nilai setiap individu. "Nilai-nilai budaya di sekolah menjadi dasar penting suatu pendidikan dalam mencetak generasi berkualitas dan berkarakter," kata Sarif di Semarang, Senin (24/2).

Ia menyatakan, pengintegrasian nilai-nilai sosial dan budaya ke dalam program pendidikan memegang peranan penting. "Ini merupakan upaya untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga peduli, berempati, dan mampu berfungsi dalam masyarakat yang beragam " kata politikus PKB itu.

Beberapa hal yang harus diberikan di masa sekolah, kata dia, seperti narasi sejarah pejuang bangsa hingga raja-raja di nusantara akan membentuk karakter kebangsaan, jiwa gotong royong, kepemimpinan, serta kepedulian. Ia menambahkan, mengenalkan budaya bukan semata-mata tugas sekolah, namun juga masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam mempersiapkan generasi penerus.

Sarif menilai berbagai tradisi di desa, seperti nyadran, merti desa, sedekah bumi, sambatan, gugur gunung, juga harus dijaga sebagai simbol menjaga kebersamaan. "Nilai-nilai luhur ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Melalui gotong royong, kita belajar saling bantu, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama," katanya. **(Ant)-d**

WABUP BOYOLALI

Resmikan Masjid Sholihin Purworejo

BOYOLALI (KR) - Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Dwi Fajar Nirwana meresmikan Masjid Sholihin yang berada di Dusun Purworejo, Desa Jeron, Kecamatan Nogosari pada Minggu (23/2) malam. Masjid ini menelan anggaran sebesar Rp 1.664.706.800.

"Pembangunan sudah selesai tinggal penyempurnaan satu atau dua lainnya. Harapannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk syiar agama, kegiatan keagamaan di lingkup Dusun Purworejo Jeron Nogosari," kata Kepala Desa Jeron, Joko Supono.

Wabup Boyolali yang kerap disapa Fajar ini menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Dusun Purworejo di Desa Jeron karena telah memiliki sebuah masjid yang indah. "Selamat atas diresmikan Masjid Sholihin Desa Jeron, semoga Masjid Sholihin menjadi sarana untuk kita semua mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya sebagai tempat untuk salat berjamaah, tetapi juga sebagai tempat syiar agama islam. Menjadi wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan," harap Wabup Fajar.

KR - Mulyawan

Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana meresmikan Masjid Sholihin di Desa Jeron, Nogosari, Boyolali.

Wabup juga berpesan kepada masyarakat Desa Jeron untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Boyolali di bawah kepemimpinan Bupati Boyolali, Agus Irawan. "Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali khususnya masyarakat Desa Jeron untuk bersama sama mendukung Bupati Boyolali," pungkasnya. **(Mul)-d**